

Newsletter Pusdatin



Volume 18 No. 9, Edisi September 2021

ISSN : 1411-9196



Daftar Isi

Tingkatkan Sektor Pertanian, Mentan Dorong Papua Cetak SDM Unggul

Halaman 1

Hutan Sagu di Papua Bisa Jadi Kawasan Agrowisata? Ini Kata Mentan

Halaman 3

Mentan Syahrul Tinjau Langsung Panen Cempé di Kaltara

Halaman 5

Peran Pusdatin Dalam Mendukung Pemetaan Poligon Luas Baku Lahan Sawah yang Terintegrasi Aplikasi Simluhtan

Halaman 6

Ground Check Data Lahan Baku Sawah Demi Data yang Berkualitas

Halaman 7

Gambaran Sebaran Stok Beras di Indonesia

Halaman 9

Info Data Pertanian

Halaman 12

Scan QR Code



atau akses link
pusdatin.setjen.pertanian.go.id

Tingkatkan Sektor Pertanian, Mentan Dorong Papua Cetak SDM Unggul

Dhanang

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membuka Pelatihan Kewirausahaan Petani Milenial di Jayapura, Papua, Kamis (2/9). Di kesempatan tersebut, Syahrul mendorong Papua untuk mencetak SDM pertanian muda yang siap menjadi wirausahawan.

Menurut Syahrul, langkah tersebut penting dilakukan karena Papua merupakan daerah subur dengan lahan pertanian yang belum tergarap maksimal. Hal ini juga tentunya dapat memperkuat sektor pertanian agar lebih maju, mandiri dan modern.

"Hari ini saya datang untuk mengatakan bahwa Papua adalah daerah yang hebat. Kalau begitu ayo kita sama-sama bertani, karena Tuhan menciptakan tanah Papua ini luar biasa. Mataharinya bersinar, airnya mengalir, tanahnya subur dan peluang ekspornya terbuka lebar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Tim Redaksi

Syahrul mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang terbukti tangguh karena dapat tetap tumbuh di tengah pandemi. Bahkan, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dalam pemulihan ekonomi nasional.

Tahun lalu ekspor kita naik 15 persen di saat COVID. Sekarang ini di kuartal 1 Januari sampai April tumbuh sekitar 40 persen. Kalau ibarat emas, pertanian itu 100 karat yang ada di depan kita pak, dan pertanian itu adalah lapangan kerja yang selalu terbuka," jelasnya.

Di samping itu, pertanian juga menjadi sektor yang menguntungkan. Pasalnya, petani dapat memanen hasil pertanian dalam satu hari, seminggu, sebulan, setahun dan bahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Terlebih saat ini telah tersedia berbagai teknologi pertanian yang modern.

"Artinya pilihan bertani itu adalah pilihan yang tepat karena petani tidak lagi seperti dulu, becek becek dan lumpur lumpur. Kita sudah siapkan teknologi dan mekanisasi," katanya.

Sementara itu, Asisten II Setda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Musaad mengapresiasi kunjungan Syahrul ke Papua. Menurutnya, kehadiran Syahrul memberi semangat bagi masyarakat Papua untuk meningkatkan sektor pertanian.

"Kehadiran Pak Menteri telah memberikan spirit bagi kita semua untuk membangkitkan potensi yang ada. Sebab selama ini kita sudah terkena dan terhipnotis dengan tambang. Padahal sebanyak 70 persen rakyat Papua menikmati hasil pertanian," katanya.

Musaad menjelaskan Papua memiliki daerah pertanian yang luas dan dapat menjadi lumbung

Penanggung jawab

Kapusdatin

Redaktur

Kepala Bagian Umum

Editor

Andry Polos, S.Kom

Aulia Azhar Abdurachman, S.Si

Dra. P. Hanny Mulianny, MM

Hani Hanifah R, S. Kom

Fotografer

Iswadi

Sri Lestari, SE

Desain Grafis

Dhanang Susatyo, SE

Rizky Purnama R, S.Kom

Sekretariat

Eli David, S.Sos, MM

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT

Cahyani Wartianingsih, S.Kom

Marwati

Hotlanis Mangatur S, S.Kom

Musdino

Priatna Sari

Didik Pratama Saputra, S.Kom



Alamat Redaksi

**PUSAT DATA DAN SISTEM
INFORMASI PERTANIAN**

Jl. Harsono RM No.3 Gd D Lantai IV

Pasar Minggu - Jakarta 12550

Telp : 021- 7805305, 7816384

Fax : 021 - 7822638

e-mail : newsletter@pertanian.go.id

pangan nasional di masa mendatang.

"Semua penduduk kita hidup di daerah hutan dan di daerah pinggiran. Mereka masih banyak yang bercocok tanam dengan cara lama, belum tersentuh dan belum mengenal teknologi. Tapi saya yakin dengan kehadiran pak menteri ini bisa membangkitkan kembali sektor pertanian di tanah Papua," katanya.

Di sisi lain, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua (BPTP Papua), Martina Sri Lestari mengatakan bahwa kualitas SDM muda

Papua perlahan mulai meningkat. Adapun hal ini lantaran kerja sama antara Kementan dan Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan bimtek dan pendampingan kewirausahaan.

"Sehingga mereka (petani milenial) sudah siap terjun di lapangan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sebab mereka sudah kita bekali ilmu kewirausahaan, ilmu menjalin kemitraan usaha, ilmu menerapkan konsep pembiayaan dan mengerti cara pemasaran," pungkasnya

Hutan Sagu di Papua Bisa Jadi Kawasan Agrowisata? Ini Kata Mentan

Dhanang 



Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mendorong lahan hutan sagu menjadi kawasan agrowisata di Sorong, Papua Barat. Menurutnya, hal itu untuk mewujudkan pertanian yang maju menuju kedaulatan pangan di Papua Barat.

Selain itu, ia mengharapkan hilirisasi dilakukan oleh para stakeholder pertanian

dengan bekerja sama untuk mendapatkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat."Ini integrated farm. Tolong Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) koordinasi bantu bupati untuk kerubutin. Kita buat industrinya. Tidak hanya sagu saja, tidak hanya Melki (petani) membuat sagu saja, tapi sekitarnya ada peternakan. Di sana ada buah

horti, kemudian tanaman pangan, dan lainnya. Jadi ada integrated farm dan modern. Semua yang dimiliki rakyat," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Ia menegaskan, Papua Barat merupakan wilayah penghasil sagu terbesar. Oleh karena itu, ia berharap pertanian yang diusahakan secara bersama dapat dipoles dengan sentuhan teknologi melalui pelatihan."Di sini sagunya oke, dan pertanian engga bisa sendiri sendiri, harus ramai ramai. Agrowisata. Satu kali turun, semua kena. Jadi jangan cuma sagu, harus ada bimtek, istri-istri harus bimtek, anak muda harus kursus. Kursus harus ada hasilnya, seperti sagu harus jadi mi. Kemudian ada perlakuan teknologi, biar tampilan (pati) menjadi putih bersih," ungkapnya. Lebih lanjut, ia menyebutkan beberapa syarat yang dapat menunjang pertanian di Sorong sehingga lebih baik. Mulai dari tunjangan infrastruktur alam, sumber daya manusia, dan modal yang dibutuhkan seperti penerapan kredit usaha bagi rakyat pertanian."Syarat pertanian yang bagus itu yang pertama lahannya oke, kemudian yang kedua airnya bagus, yang ketiga rakyatnya mau bersama pemerintah. Jangan rakyat saja, pemerintahnya nggak. Atau pemerintahnya saja, rakyatnya engga. Kemudian seterusnya membutuhkan pelatihan, lalu butuh modal. Pak Jokowi sudah memberikan KUR," kata dia. Sementara itu Bupati Sorong, Johnny Kamuru, yang hadir dalam kunjungan kerja Syahrul menyampaikan kesediaannya atas saran untuk dilakukan pengembangan agrowisata di daerahnya. "Pak Menteri, kami sangat bersedia untuk pengembangan - pengembangan komoditi pertanian untuk memajukan

Sorong. Bukan hanya bantuan dari gubernur, namun kami berharap ada bantuan bantuan langsung untuk pengembangan Sorong dari kementerian melalui dinas pertanian" katanya. Pada kegiatan kunjungan kerja di Distrik Aimas, kelurahan Malawi, kabupaten Sorong tersebut, Syahrul berkesempatan meninjau lahan dan rumah pengolahan sagu sederhana milik petani Melkianos Malagam, yang mengelola kurang lebih tiga hektar lahan sagu.

Diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Indonesia telah mengekspor sagu pada 2020 sebesar 13 ribu ton atau senilai Rp 40 miliar. Kemudian selama kurun waktu 2020 hingga semester 1 2021, volume ekspor sagu meningkat 5,1%.

Sementara itu, areal sagu nasional saat ini mencapai 196.831 hektar dengan 99,65% areal berupa perkebunan rakyat. Papua dan Papua Barat merupakan sentra terbesar sagu nasional yang berkontribusi sebesar 29,2% dari areal sagu nasional.

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAGU

**BAHAN PANGAN PENGGANTI NASI
YANG MENGADUNG GIZI TINGGI**

- Tepung sagu memiliki kandungan gizi yang lebih baik ketimbang pangan karbohidrat lain.
- Sagu juga memiliki kandungan gizi tinggi untuk asupan kesehatan dan vitalitas.
- Sagu tergolong rendah lemak, yakni hanya sekitar 0,2 gram dalam jumlah 100 gram.
- Sagu secara ilmiah terbukti mengandung energi 355 kalori, 85,6 persen karbohidrat dan 5 persen serat.

Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber

www.pertanian.go.id

Mentan Syahrul Tinjau Langsung Panen Cempe di Kaltara

Dhanang 



Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meninjau kegiatan panen Cempe Kambing Boer usia 4 bulan di Bulungan Mandiri Farm, Kalimantan Utara. Di sana Mentan memantau langsung proses peranakan sampai dengan proses penjualan.

Menurut Mentan, Kalimantan Utara sebagai tempat kambing cempe tersebut diproduksi memiliki potensi dan peluang yang cukup besar, terutama dalam memenuhi pasar ekspor ke negara-negara di Asia.

"Karena itu saya berharap Forkopimda dan juga para Bupatinya sama-sama memaksimalkan lahan-lahan pertanian yang ada untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar," ujar Mentan, Sabtu, 11 September 2021.

Mentan mengatakan, Kaltara selama ini memiliki lahan subur dan potensi ekspor yang cukup besar. Di sana antara peternakan dan perkebunan bisa diintegrasikan secara bersamaan dengan komoditas tanaman pangan dan produk olahan.

"Karena itu tolong disusun Pak Gubernur, Pak Bupati, Kepala Dinas dan seluruh Dirjen

agar konsep integrasi ini bisa dikembangkan secara baik," katanya.

Di samping itu, Mentan berharap petani dan para pelaku usaha lainya mampu menyerap anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian yang kini memiliki nilai 70 triliun. Uang sebanyak itu bisa dimanfaatkan dan di akses untuk permodalan wirausaha.

"Program KUR adalah bentuk kehadiran negara terhadap kesejahteraan petani. Program ini menjadi atensi Presiden agar betul-betul bisa dimanfaatkan menjadi kekuatan baru bagi bangsa Indonesia," katanya.

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang menyampaikan terimakasih atas kunjungan Mentan Syahrul ke wilayah kerjanya. Menurut Zainal Kaltara sebagai Provinsi penyangga memiliki potensi besar terhadap sektor pertanian dan peternakan Indonesia.

"Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran langsung Pak Menteri beserta rombongan yang sudah lama sekali kami nantikan. Pak Menteri yang saya hormati perlu kami sampaikan bahwa wilayah kami memiliki peluang dan potensi yang luar biasa, utamanya pada subsektor peternakan," tutupnya.



PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
TOLAK GRATIFIKASI
Pelaku Suap, Pungli dan Gratifikasi
bisa dipidana !!

Undang - undang
Nomor 20 Tahun 2001

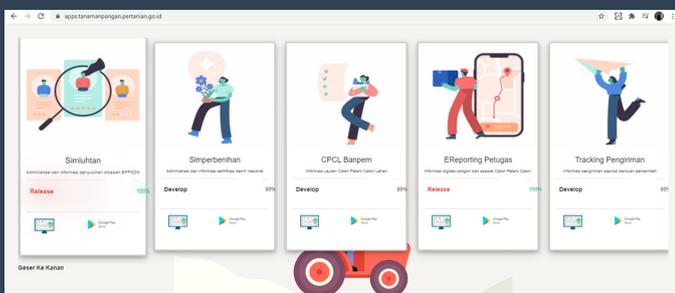
www.pusdatin.setjen.pertanian.go.id

Peran Pusdatin Dalam Mendukung Pemetaan Poligon Luas Baku Lahan Sawah yang Terintegrasi Aplikasi Simluhtan

Aulia Azhar Abdurachman 

Direktur Serealia ditjen Tanaman Pangan Bapak Dr. Ir. Moh Ismail Wahab, M.Si menyampaikan bahwa data spasial lahan baku sawah yang seluas 7,46 juta ha harus diketahui kepemilikan kelompok tani setiap petakannya. Oleh karena itu perlu dibuat poligon per kelompok tani, untuk membuat poligon tersebut dibuatlah aplikasi e-reporting. Aplikasi e-reporting ini bisa didownload di google playstore secara gratis. Aplikasi e-reporting sudah terintegrasi dengan aplikasi simluhtan. Aplikasi e-reporting dapat digunakan untuk melaporkan lahan per kelompok tani dengan melampirkan Identitas dan Foto open camera guna untuk merespon cepat atas laporan-laporan lahan dari kelompok tani. Apabila titik koordinat sudah bagian dari pengamatan petugas penyuluh maka yang dilakukan hanya melakukan digitasi on screen untuk mendapatkan poligon lahan. Dalam melakukan pendataan poligonal lahan per kelompok tani dilakukan oleh penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian akan diberi honor sebesar Rp.1500 setiap hektar lahan pertanian yang dilakukan digitasi.

terintegrasi aplikasi simluhtan ini dengan menyiapkan data luas lahan kelompok tani dari simluhtan untuk disandingkan nanti dengan aplikasi e-reporting, untuk di uji kualitas hasil pendataan menggunakan aplikasi e-reporting ini. Selain itu Kapusdatin juga menyampaikan beberapa saran untuk aplikasi ini antara lain ; (1) agar dibuat Standard Operating Procedure (SOP) dalam melakukan digitasi on screen menggunakan aplikasi e-reporting ini yaitu untuk dijitasi di skala 1: 2500 apabila mau menghasilkan peta 1: 5000, (2) Menambah fitur pada aplikasi e-reporting ini agar bisa menampilkan posisi GPS saat di lapangan, (3) Akurasi petugas dijitasi lebih diperhatikan lagi, khususnya untuk poligon yang overlap, (4) Hasil dijitasi dari berbagai macam aplikasi diharapkan bisa dimanfaatkan untuk aplikasi yang lain sehingga tidak saling tumpang tindih, (5) Hasil dijitasi lahan kelompok tani untuk tidak dirilis terlebih dahulu sebelum ada review dari Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.



Gambar 1 Aplikasi e-reporting

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Bapak Roby darmawan menghimbau agar pusdatin turut serta mendukung kegiatan pemetaan poligon luas baku lahan sawah yang



Ground Check Data Lahan Baku Sawah Demi Data yang Berkualitas

Bramantyo IK 



Berbicara mengenai data tentu tak lepas dari kualitas data itu sendiri. Data yang berkualitas adalah data yang akurat, sesuai fakta yang ada di lapang, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terlepas dari subjektivitas dan kepentingan. Kementerian Pertanian, selaku produsen utama data pertanian, dalam hal ini selalu berusaha untuk mewujudkan satu data pertanian Indonesia yang berkualitas.

Salah satu data yang memiliki peranan penting dalam data pertanian adalah data luas Lahan Baku Sawah (LBS), karena data tersebut berkaitan langsung dengan keakuratan data lainnya, seperti luas tanam, luas panen, dan produksi, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, maupun tanaman pertanian lainnya, sehingga data LBS yang akurat tentu sangat dibutuhkan, terutama bagi para pengambil kebijakan, untuk pembangunan pertanian Indonesia. Saat ini data LBS Indonesia secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, dengan data terakhir yang dikeluarkan adalah data tahun 2019, yang luasannya sebesar 7,46 juta hektar.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) sebagai salah satu unit instansi di Kementerian Pertanian mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, serta membuat kajian komoditas pangan strategis yang berguna untuk membantu dalam perumusan kebijakan, perencanaan, evaluasi, dan monitoring oleh para pengambil kebijakan. Oleh karena itu Pusdatin berusaha untuk berperan aktif dalam rangka menjaga keakurasian data tersebut.

Untuk mendukung terwujudnya satu data pertanian Indonesia yang berkualitas, pada bulan Agustus yang lalu Pusdatin melakukan upaya ground check LBS di beberapa wilayah, yaitu di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Serang, dan Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Subang. Petugas melakukan validasi di lapang selama 3 hari, dengan mengambil sampel di beberapa titik dari masing-masing kabupaten yang telah ditentukan. Ground check ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian data LBS dengan kondisi terkini di lapang, mengingat data LBS terakhir adalah tahun 2019 sehingga ada kemungkinan dalam kurun waktu dua tahun ini telah terjadi alih fungsi lahan ataupun penambahan areal pertanian.

Cek data di lapang ini menggunakan aplikasi ArcGIS Collector yang berisi data dari Radar Sentinel 1, untuk memudahkan petugas mencapai titik koordinat dan melihat kondisi terakhir pertanaman di lahan baku sawah. Pada aplikasi ini juga sudah dilengkapi legenda dan warna yang berbeda untuk masing-masing

fase pertanaman, mulai dari bera, vegetatif 1, vegetatif 2, generatif 1, generatif 2, hingga panen. Setelah mencapai titik koordinat yang dituju, petugas dapat dengan mudah melakukan digitasi untuk mengetahui luasan areal yang sedang diamati dan mencocokkan data antara aplikasi dan kondisi riil di lapangan.

Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa sebagian besar data LBS yang ada pada aplikasi ArcGIS Collector masih sesuai dengan keadaan di lapang, namun di beberapa titik sudah terjadi alih fungsi lahan, sehingga seharusnya tidak lagi masuk menjadi lahan baku sawah daerah tersebut. Alih fungsi lahan tersebut sebagian besar terjadi di daerah industri, dimana lahan sawah banyak berubah menjadi pabrik atau kawasan industri. Selain itu tak sedikit juga lahan sawah yang berubah menjadi daerah pemukiman ataupun sekolah, hal ini terlihat dari maraknya pembangunan perumahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal.

Pengamatan oleh tim Pusdatin tidak saja terhadap luas lahan baku sawah yang ada, namun juga melakukan pengamatan mengenai pemanfaatan lahan sawah itu sendiri. Sebagian besar lahan sawah yang ada digunakan untuk pertanaman padi, tetapi tak sedikit pemanfaatan lahan sawah untuk pertanaman hortikultura, seperti sayuran dan buah-buahan. Pola tanam di beberapa daerah juga menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ekonomi setempat, sehingga terkadang tak selamanya lahan tersebut dimanfaatkan untuk menanam padi, terutama di daerah yang selama ini terkenal sebagai sentra tanaman hortikultura. Bahkan di beberapa lokasi ditemukan bahwa lahan sawah tersebut tidak

termanfaatkan sama sekali, atau dibiarkan begitu saja, baik karena alasan cuaca, biaya, ataupun kondisi lahan yang sudah tak layak lagi untuk dijadikan lahan pertanian. Hal ini tentu saja dapat menjawab pertanyaan dari beberapa pihak mengenai data luas tanam ataupun panen padi yang tidak optimal sesuai dengan data LBS yang ada.

Dari hasil ground check juga ditemukan bahwa data yang ada pada Radar Sentinel 1, belum akurat 100%, atau masih adanya ketidaksesuaian antara data pada aplikasi dengan kondisi sebenarnya di lapang. Misalnya di Kabupaten Serang, ditemukan areal sawah yang sudah ditanami padi dengan fase vegetatif 1 menuju vegetatif 2, namun di data Sentinel 1 masih dalam kondisi bera. Begitu pula sebaliknya, pada data Sentinel 1 menunjukkan adanya pertanaman padi pada fase generatif 2, namun pada kenyataannya di lapang masih dalam kondisi bera. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan teknologi seperti satelit yang ada tanpa melakukan validasi manual di lapang.

Hasil ground check Pusdatin ini tentunya bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, atau menyalahkan data yang sudah ada. Namun dari hasil ini semoga bisa menjadi masukan dan sarana perbaikan ke depan, agar data yang kita hasilkan semakin dapat dipertanggungjawabkan. Pusdatin dan tentunya Kementerian Pertanian selalu siap untuk terus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait demi mewujudkan satu data pertanian Indonesia yang berkualitas.

Ketahanan pangan nasional masih menjadi isu yang penting bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga sub sistem tersebut. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat, untuk itu ketahanan pangan yang dibangun di Indonesia harus memenuhi kriteria cukup secara berkelanjutan bagi seluruh penduduk, terutama dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman dan terjangkau dari waktu ke waktu.

Terkait subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, stok serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga meskipun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya sesuai permintaan dari waktu ke waktu. Pemenuhan konsumsi pangan terutama beras bagi sebagian besar penduduk Indonesia adalah sebagai bahan makanan utama disamping merupakan sumber nutrisi penting dalam struktur pangan, sehingga

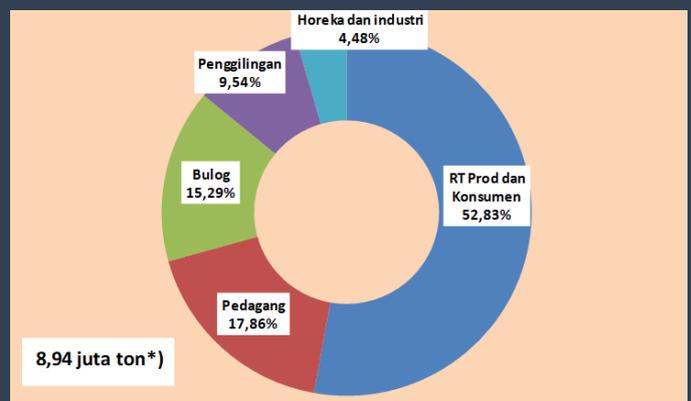
aspek penyediaan menjadi hal yang sangat penting mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat. Produksi beras dalam negeri dari tahun ke tahun terus meningkat, walaupun laju pertumbuhannya cenderung melandai. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 0,94% per tahun pada periode tahun 2020-2025 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, SUPAS-BPS, 2018). Dengan kenyataan ini maka total konsumsi domestik beras Indonesia akan terus meningkat walaupun per kapitanya menunjukkan penurunan. Berdasarkan data hasil SUSENAS - BPS, konsumsi beras per kapita cenderung menurun yakni dari 107,71 kg/kapita/tahun pada tahun 2002 menjadi 93,78 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 (Susenas - BPS, 2002 dan 2020). Penurunan laju pertumbuhan ini kemungkinan terjadi karena meningkatnya kesadaran tentang diversifikasi pangan, pengembangan bahan pangan pokok lokal atau meningkatnya konsumsi pangan turunan dari terigu (seperti mie dan roti).

Tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi beras menyebabkan bahan pokok tersebut memiliki nilai strategis baik secara politik maupun ekonomi. Sehingga informasi perkiraan kondisi neraca ketersediaan dan kebutuhan beras melalui perhitungan prognosa neraca beras sangat diperlukan sebagai acuan dalam perencanaan dan upaya penyediaan pangan nasional. Tim penyusun prognosa neraca beras dikoodinir oleh BKP dengan

anggota tim dari Ditjen Tanaman Pangan, BPS dan Pusdatin dan dilakukan updating data setiap akhir bulan sesuai rilis publikasi data penyusunnya. Berdasarkan prognosa neraca beras tahun 2021 yang dilakukan update data per 30 Agustus 2021 diperkirakan total kebutuhan beras 2021 sebesar 29,66 juta ton (konsumsi per kapita sebesar 108,94 kg/tahun dan jumlah penduduk 272,25 Juta Jiwa). Perkiraan produksi beras mencapai 30,61 juta ton dan stok awal tahun 2020 sebesar 7,39 juta ton yang tersebar di rumah tangga produsen/petani dan rumah tangga konsumen, Bulog, penggilingan, pedagang, horeka (hotel, restoran dan catering), LPM (Lumbung Pangan Masyarakat), PIBC (Pasar Induk Beras Cipingan) Jakarta. Pada akhir 2021 diperkirakan surplus beras menjadi 8,34 juta ton dan terjadi surplus setiap bulannya.

Stok beras merupakan jumlah beras yang disimpan sebagai cadangan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Stok beras di pemerintah adalah stok beras yang berada di Bulog yang tersebar di 26 divre (divisi regional) di seluruh Indonesia, selainnya merupakan stok di masyarakat. BKP mulai tahun 2020 telah melakukan pengelolaan data stok beras yang lengkap dan dilakukan update setiap bulan. Pengumpulan data stok oleh BKP pada sampel penggilingan dan pedagang beras dilakukan periode mingguan, selain itu juga mengumpulkan data stok beras dari Bulog, PIBC, LPM dan untuk stok beras di horeka dan rumah tangga menggunakan proporsi dari hasil survei BPS 2015. Berdasarkan penghitungan sebaran stok beras yang bersumber dari BKP pada

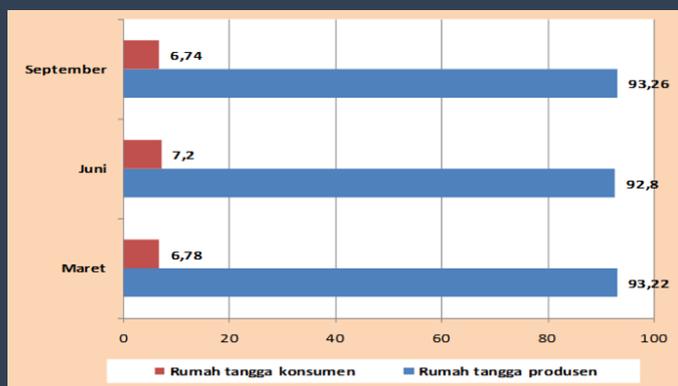
periode akhir Agustus 2021 terdapat stok beras sebesar 7,9 juta ton dengan urutan sebaran stok beras sebesar 53.3% berada di rumah tangga (produsen dan konsumen), disusul kemudian di penggilingan sebesar 18,28 %, di Bulog 14,61 %, di pedagang 8,73 %, di horeka 4,46% , di PIBC 0,47% dan 0,16% di LPM. Melihat data sebaran stok beras tersebut, menunjukkan stok beras sebagian besar berada di masyarakat dengan lokasi stok beras utamanya adalah di rumah tangga produsen atau petani di susul kemudian di penggilingan, Bulog dan pedagang beras. Gambaran sebaran stok beras tersebut sejalan dengan hasil survei kajian cadangan beras yang telah dilakukan oleh BPS pada tahun 2015 dengan melakukan 3 periode survei yaitu tanggal 31 Maret, 30 Juni dan 30 September 2015, dengan rata-rata stok beras pada periode tersebut sebesar 8,94 juta ton dan tersebar di rumah tangga produsen dan konsumen 52,83%, disusul di pedagang 17,86%, di Bulog 15,29%, penggilingan 9,54%, horeka dan industri sebesar 4,48%, seperti tersaji dalam Gambar 1.



Gambar 1. Rata-rata sebaran stok beras, BPS 2015
Keterangan : *) Rata-rata dari 3 periode survei, Survei kajian cadangan beras BPS, 2015 diolah Pusdatin

Bila kita cermati lebih rinci, besarnya stok di rumah tangga produsen dan konsumen

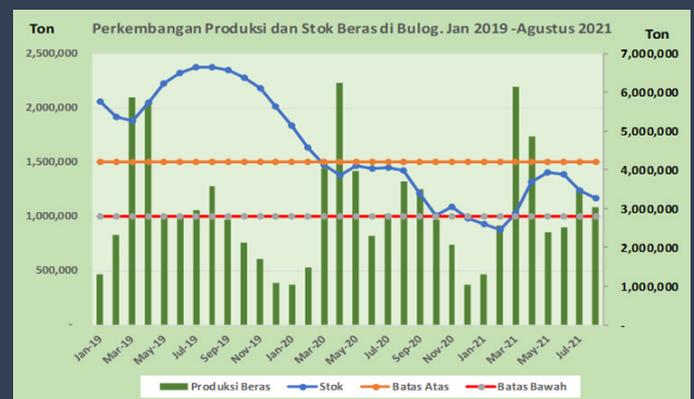
tersebut berdasarkan BPS 2015, sebagian besar stok berada di rumah tangga produsen atau petani mencapai lebih dari 92% dan sebagian besar berupa gabah/GKG dan sisanya di rumah tangga konsumen berupa wujud beras. Sebaran selama 3 periode survei yang dilakukan BPS tahun 2015 seperti tersaji pada Gambar 2. Sementara besarnya rata-rata stok gabah per rumah tangga produsen sebesar 3 kuintal dan rata-rata stok beras di rumah tangga konsumen sebesar 7 kg.



Gambar 2. Persentase sebaran stok gabah/beras di rumah tangga BPS, 2015

Selanjutnya bila kita lihat lebih rinci sebaran stok beras di pemerintah yaitu stok beras yang berada di Bulog selama Januari 2019 sampai dengan Agustus 2021, terjadi pola yang menarik untuk dicermati (Gambar 3). terlihat Januari 2019 hingga Februari 2020 rata-rata stok beras berada di atas 1,5 juta ton bahkan Juni hingga September 2019 menyentuh angka 2,3 juta ton, dan terlihat mulai Maret 2020 atau awal terjadinya masa Pandemi Covid-19 di Indonesia sampai dengan saat ini stok beras di Bulog memiliki pola stok pada kisaran 1 juta sd 1,5 juta ton dan posisi ini dianggap sebagai stok aman beras di Bulog. Sehingga pada Desember 2020 hingga Februari 2021 terlihat stok beras kurang dari 1 juta ton, dan sempat terjadi polemik untuk melakukan impor beras,

disisi lain bulan Maret-April merupakan puncak panen raya padi di Indonesia, tentunya hal tersebut akan mempengaruhi harga dan penyerapan gabah petani nantinya, sehingga rencana impor beras tersebut tidak dilakukan. Kondisi tersebut sejalan dengan prognosa neraca beras yang telah disusun Kementan, bahwa persediaan beras dalam negeri telah mencukupi kebutuhan beras masyarakat Indonesia setiap bulannya, bahkan surplus dan didukung juga oleh harga beras relatif stabil selama 3 tahun terakhir ini. Besarnya stok tahun 2019 di Bulog dibandingkan tahun 2020 disebabkan tidak adanya program penyaluran beras oleh Bulog pada tahun 2019, sementara pada masa Pandemi Covid-19 ini, Bulog telah diberi tugas melalui penyaluran program bantuan sosial akibat Pandemi covid 19 bekerjasama dengan Kementerian Sosial, sehingga stok berasnya terlihat menurun atau terjadi pengeluaran berasnya.



Gambar 3. Sebaran produksi beras di Indonesia dan Stok beras di Bulog, Januari 2018 sd Agustus 2021

Keterangan : produksi beras=produksi GKG (KSA,BPS) x 64,02%

Mohon Kesediannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan
bit.ly/surveipusdatin

Info Data Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP)

- NTP nasional Agustus 2021 sebesar 104,68 atau naik 1,16 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,17 persen; lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,01 persen.
- Secara nasional, NTP Januari–Agustus 2021 sebesar 103,47 dengan nilai It sebesar 111,44 sedangkan Ib sebesar 107,71.
- Pada Agustus 2021, NTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan tertinggi (3,68 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan terbesar (1,41 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.
- Pada Agustus 2021 terjadi penurunan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,05 persen yang disebabkan oleh penurunan indeks pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau.
- Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Agustus 2021 sebesar 104,80 atau naik 1,00 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Inflasi

Pada Agustus 2021 terjadi inflasi sebesar 0,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,57. Dari 90 kota IHK, 34 kota mengalami inflasi dan 56 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 0,62 persen dengan IHK sebesar 108,48 dan terendah terjadi di Tanjung sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 108,17. Sementara

deflasi tertinggi terjadi di Sorong sebesar 1,04 persen dengan IHK sebesar 107,20 dan terendah terjadi di Meulaboh, Sukabumi, dan Timika masing-masing sebesar 0,03 persen dengan IHK masing-masing sebesar 109,93; 106,56; dan 108,14.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,32 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,20 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,10 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,15 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,32 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 persen; kelompok transportasi sebesar 0,05 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,07 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Agustus) 2021 sebesar 0,84 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2021 terhadap Agustus 2020) sebesar 1,59 persen.

Komponen inti pada Agustus 2021 mengalami inflasi sebesar 0,21 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Agustus) 2021 sebesar 1,03 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Agustus 2021 terhadap Agustus 2020) sebesar 1,31 persen.

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)